



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Tahun 2022





BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022

DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 Ayat (4), Pasal 264 Ayat (2) dan Pasal 265 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- b. bahwa untuk menjaga konsistensi arah pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan kesiapan yang matang dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 maka perlu disusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempunyai fungsi membantu Bupati dalam merencanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
7. Unit kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah organisasi perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat dengan MUSRENBANG adalah musyawarah stakeholder untuk mematangkan rancangan RKPD berdasarkan rencana kerja OPD hasil Forum OPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan rencana kerja OPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah sebelum disepakati oleh DPRD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
17. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
18. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

19. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
21. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2022 yang dimulai pada tanggal 2 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- (2) RKPD kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 merupakan penjabaran RPJMD untuk waktu pelaksanaan tahun 2022.
- (2) RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam menyusun :
 - a. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
 - b. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
 - c. Rancangan APBD tahun anggaran 2022 dan perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2022; dan
 - d. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:

- a. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggunakan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD; dan
- b. OPD menggunakan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan anggaran OPD dengan DPRD.

Pasal 5

- (1) OPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi tentang keluaran kegiatan dan indikator hasil outcome masing-masing program.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang berkenaan sebagai bahan penyusunan evaluasi RKPD.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam analisa dan evaluasi terhadap usulan program dan kegiatan tahun berikutnya yang diajukan oleh OPD yang bersangkutan.

Pasal 6

Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

pada tanggal, 01 - JULI - 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal

pada tanggal, 01 - JULI - 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SANUSI

KATA PENGANTAR

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tahun 2022 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun keempat dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2025 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Renja Tahun 2022 disusun sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, Pagu Indikatif dan sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Renja Tahun 2022 merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun. Disamping menyajikan data perencanaan Rancangan Akhir Renja Tahun 2022 juga menyajikan kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja SKPD tahun 2022 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan dalam mendukung program Pemerintah Daerah.

Kuala Tungkal, Juni 2021

Kepala BKAD
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Drs. RAJIUN SITOANG, ME
PembinaUtamaMuda
NIP. 19611120 199203 1 001

DAFTAR ISI

HalamanJudul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	15
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	18
2.4. Review TerhadapRancangan Awal RKPD.....	18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	25
3.3. Program dan Kegiatan	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	32
BAB V PENUTUP.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Akhir Renja BKAD merupakan pelaksanaan dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah.

Pasal 138 ayat (1) Perumusan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 138 (2) Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

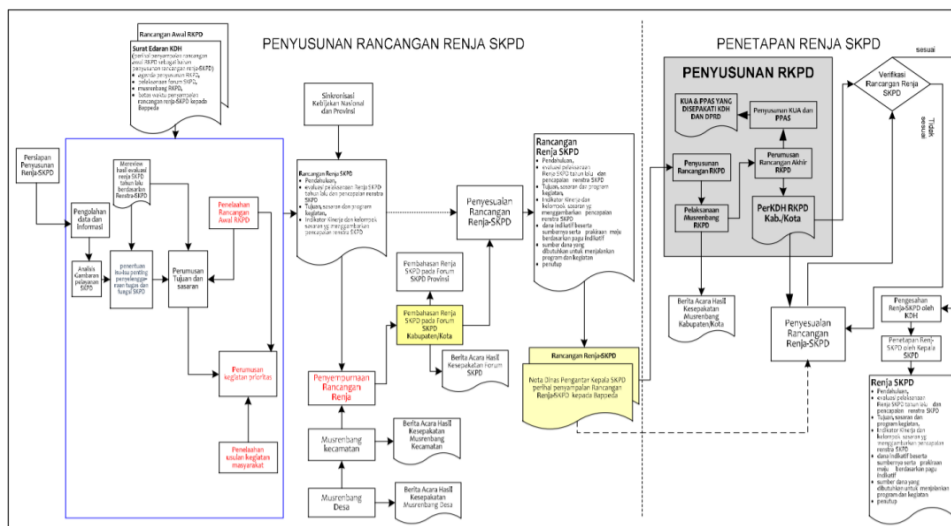
Pasal 138 (3) Rancangan akhir renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dalam pasal 129.

Mengingat pentingnya arti dokumen Rancangan Akhir Renja OPD/SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan berdasarkan surat edaran Bupati Nomor : 050/353/V/Bappeda/2020 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) perangkat Daerah Tahun 2022 dan Buku Panduan Rangkaian Musrenbang Tahun 2020 yang memuat mekanisme pelaksanaan dan informasi umum pelaksanaan rangkaian Munsrenbang tingkat Kabupaten.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah :

Gambar.G-VI.A.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota



Sejalan dengan Misi ke 4 (empat) Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu “Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Daerah Melalui Harmonisasi Kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik”, maka ditetapkanlah Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aser Daerah yaitu “Pengelola Keuangan Yang Efektif, Efisien, Ekonomis dan Akuntabel Dalam Rangka Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas” yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan di Tahun 2022 yang menjadi tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Rancangan Akhir Renja Tahun 2022

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hokum dalam penyusunan Rancangan RENJA BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun angko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Reppublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

- Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 nomor 23);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2022;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2022;

23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah .
24. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan akhir Renja-SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022, antara lain :

1. Memberikan informasi tentang Rencana Program dan Kegiatan tahunan.
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.
3. Sebagai bahan masukan/landasan dalam menyusun kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Sedangkan, tujuannya adalah :

1. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Rancangan Akhir Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Pengertian ringkas tentang Rancangan Akhir Renja, proses penyusunan Rancangan Renja, Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Rentra SKPD/OPD dengan Renja K/L dan Renja Pro/Kab/Kota dari tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum.

Penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat

Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan.

Pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Akhir Renja SKPD serta sistem garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan tahun berjalan (tahun n-1).

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.

Kajian terhadap capaian pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Gambaran sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang yang dimiliki serta dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi.

2.4. Review Terhadap Rancangan RPKD.

Proses membandingkan antara rancangan RPKD dengan hasil analisa kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan RPKD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan mursrebang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait

dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumus isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan.

Penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran. BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selain mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintah koordinator dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah juga adalah salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa SKPKD selaku PPKD (dalam hal ini BKAD) mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Memperhatikan ketentuan tersebut, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan pendukung penyelenggaraan mendukung pelaksanaan dari Misi ke 4 (empat) Bupati Tanjung Jabung Barat yaitu “Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Daerah Melalui Harmonisasi Kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik” yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan. Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja program kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat dilihat pada Tabel 2.1 :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2021
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NAMA OPD : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KODE	URUSAN/BID. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN		KETERANGAN
					TARGET RENJA TAHUN 2019	REALISASI RENJA 2019	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2020)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)	12
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Renstra / Renja / Dpa / Evaluasi Renstra, Renja /	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ranwal/ rancangan/ ranhir / renstra / renstra yang disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	5 Dokumen	10 Dokumen	100,00	
04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	LAKIP / LPPK/ LPPD / Lap. Keu / dst.. Yang disusun	4 Dokumen	12 Bulan	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	3 Dokumen	12 Bulan 6 Dokumen	100,00	
07	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan keuangan tahunan OPD	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji/ tunjangan	41 Orang	-	-	-	-	-	-	0,00	
10	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN dibayarkan honorarium	24 Orang	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	36 Bulan	100,00	
11	Pelaksanaan Pentausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan hasil pengujian / verifikasi keuangan OPD yang disusun	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	0,00	
13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang tersiapkan	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
15	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang di beli	80 Orang	1 Kegiatan	2 Paket	2 Paket	100,00	1 Kegiatan	2 Kegiatan 4 Paket	100,00	
18	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang diberikan pendidikan / pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan adm umum OPD meliputi 7 sub kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan (waktu) penyediaan penerangan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	36 Bulan	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)	12	
	09	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat / perlengkapan kantor yang dibeli / disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	36 Bulan	100,00	
	12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	36 Bulan	100,00	
	22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	36 Bulan	100,00	
	26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan-undangan	29 Media	29 Media	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	36 Bulan	100,00	
03		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi sesuai kebutuhan secara efisien	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	36 Bulan	100,00	
	02	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah kelompok arsip dinamis yang dikelola	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
05		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan OPD	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	05	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda empat / kendaraan roda dua yang di beli	-	-	-	-	-	-	-	-	
06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat / mesin atau (nama alat / mesin) yang di beli	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	1 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00	
	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
33		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang terkelola	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	36 Bulan	100,00	
	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah hitungan beban telepon / air / listrik yang terpakai... atau jumlah	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100,00	-	24 Bulan	0,00	
	02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Untuk Pelayanan Kantor	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	0,00	
06		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah total BMD yang dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	07	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara/perbaikan / dibayarkan pajak	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	36 Bulan	100,00	
	08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara / perbaikan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	36 Bulan	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)	12
09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor / bangunan lainnya yg dipelihara /rehab	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
20	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
21	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
22	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS yang tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	4 Dokumen	10 Dokumen	100,00	
23	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	0,00	
24	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperda/Perda tentang APBD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	8 Dokumen	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Raperda/Perda tentang perubahan APBD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	8 Dokumen	100,00	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinas penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja	44 SKPD	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	1 Kegiatan	2 Kegiatan		
25	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
26	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah terbukukannya jenis transaksi pengeluaran, penerimaan, belanja daerah dan Mou antara pihak SKPD dan bank terkait	578 Buku	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Laporan	24 Bulan 12 Laporan		
27	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah terbitnya spd pertriwulan dan spd perubahan pada SKPD	5 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	10 Dokumen	24 Bulan 10 Dokumen	100,00	
28	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	terlaksananya pembiayaan daerah sesuai dengan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	36 Bulan	100,00	
29	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	Jumlah terbitnya laporan DAK fisik, DAK Non fisik, dana desa dan DID	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	36 Bulan	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)	12
30	Koordinasi dan Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran perhitungan pihak ketiga	tertibnya laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
31	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah terkoordinasinya penagihan piutang dan utang pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
32	Koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	terlaksananya pembayaran non tunai terhadap penerimaan dan pembiayaan daerah pada SKPD	44 SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	36 Bulan	100,00	
33	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	terlaksananya rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	44 SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	36 Bulan	100,00	
34	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	tersusunnya regulasi tentang administrasi pengelolaan keuangan daerah	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
35	Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	terlaksananya pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
36	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-	Jumlah dokumen rekonsiliasi pendapatan dan belanja seluruh SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	36 Laporan	100,00	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen laporan Keuangan semester	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	12 Dokumen	36 Laporan	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)	12
37	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Jumlah Dokumen Raperda, raperbup dan perda pertanggungjawaban perbub Penjabaran Tentang LKPD	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
38	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah unaudited dan audited tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	100,00	
39	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
40	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah terlatihnya SDM SKPD dalam menyusun laporan keuangan	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	114 Desa	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya pengelolaan anggaran belanja tidak terduga	1 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan dana bagi hasil	114 Desa	-	-	-	-	-	-	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terciptanya tata kelola Barang Milik Daerah yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
41	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
42	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga Barang	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	1 Dokumen	100,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana kebutuhan barang milik daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana kebutuhan barang milik daerah	10 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	36 Bulan	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)	12
44	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah data barang milik daerah yang berbasis sistem informasi	45 OPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	36 Bulan	100,00	
45	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen/laporan inventarisasi barang milik daerah	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen kepemilikan sebagai legalitas hukum atas barang milik daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penilaian barang milik daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah	6 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	36 Bulan	100,00	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penggunaan, pemanfaatan, penilaian dan penghapusan barang milik daerah	6 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	36 Bulan	100,00	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen rekonsiliasi barang milik daerah seluruh SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	
74	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah (semester dan tahunan)	-	-	-	-	0,00	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Pencapaian kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah, sehingga analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian				Proyeksi				Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	12	13	14	15	15	16
	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																	
	- Penyusunan Analisa Standar Belanja		Tersusnya Buku Analisa Standar Belanja	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD		Tersusnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD		Tersusnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD		Tersusnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD		Tersusnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD		Terlaksananya Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	- Penerbitan dan Pengendalian Surat Penyediaan Dana (SPD)		Tersedianya SPD seluruh Perangkat Daerah	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	
	- Penyusunan Anggaran Kas Pemkab Tanjung Barat dan Alokasi Triwulan Belanja SKPD		Tersusnya Anggaran Kas dan Alokasi Triwulan Belanja SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	5 Dokumen/ SKPD	
	- Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung		Kelancaran Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	
	- Perencanaan dan Penyusunan Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan		Kelancaran Perencanaan dan Penyusunan Belanja Gaji dan Tunjangan lainnya bagi PNS	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	
	- Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD		Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	- Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial		Terlaksananya Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sesuai ketentuan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	- Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya		Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	- Peningkatan Pelayanan Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah		Kelancaran dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penatausahaan Keuangan dan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	- Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Keuangan Daerah		Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	- Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah		Tersusnya Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Pengelolaan dan penatausahaan realisasi keuangan DAU dan DAK		Terlaksananya Pengelolaan dan penatausahaan realisasi keuangan DAU dan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	- Evaluasi Pencapaian Kinerja Belanja Langsung Keuangan Daerah		Terlaksananya Evaluasi Pencapaian Kinerja Belanja Langsung Keuangan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	- Pengelolaan dan Pengendalian Kas Daerah		Terciptanya Laporan Arus Kas yang transparan dan akuntabel	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
	- Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah serta Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah		Kelancaran dan Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksana	Terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	- Penyusunan Pelaporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama		Tersusnya Laporan Realisasi Anggaran Dana TP dan UB	4 Laporan	4 Laporan	-	4 Laporan	-	-	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	
	- Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran		Laporan Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
	- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Tersusnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Verifikasi dan Pengolahan Data Transaksi Keuangan Daerah		Informasi dan Data Transaksi Keuangan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	
	- Penatausahaan dan Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Daerah		Dokumen Keuangan Daerah Terarsipkan secara Elektronik	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	
	- Peningkatan Penataan Jaringan Komunikasi Keuangan Daerah		Kelancaran Jaringan Komunikasi Keuangan Daerah	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	- Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		Terlathnya SDM Keuangan Unit Kerja	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	- Pelaksanaan Pelaporan Akuntansi Pendapatan dan Belanja		Terlaksananya Sistem Akuntansi Pemerintah	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	

No	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian				Proyeksi				Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	12	13	14	15	15	16
	- Penatausahaan Penerimaan		Terekonsiliasinya data penerimaan di SKPD	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
	- Penatausahaan Belanja		Terekonsiliasinya data belanja di SKPD	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
	- Pengelolaan Barang Milik Daerah		Pengelolaan BMD terlaksana sesuai ketentuan	12 Bulan						12 Bulan								
	- Penyusunan Standar Satuan Harga		Buku Standar Satuan Harga	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	- Peningkatan Manajemen Barang Milik Daerah		Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	- Inventarisasi Barang Milik Daerah		Tersedianya Data Barang Milik Daerah yang akurat	1 Laporan	1 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				
	- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Tersedianya Laporan Daftar Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
	- Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Terlaksananya Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	- Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Terlaksananya Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	- Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah		Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan dan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan dan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian yang signifikan bagi SKPD dimana dengan beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD diantaranya :

1. Penataan Akuntabilitas Transparansi dalam pengelolaan Keuangan Daerah yang belum terintegrasi berbasis elektronik.
2. Terdapat aset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum memiliki legalitas (Sertifikat).

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil analisa kebutuhan dalam review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 dapat disajikan dalam Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rancangan Akhir Renja BKAD terhadap RKPd tahun 2022
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	RKPd					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BKAD			11.103.532.899	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BKAD			10.726.687.413	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKAD	Renstra / Renja / Dpa / Evaluasi Renstra, Renja / Lakip yang disusun		119.574.750	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKAD	Renstra / Renja / Dpa / Evaluasi Renstra, Renja / Lakip yang disusun		119.574.600	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKAD	Ranwal/ rancangan/ ranhir / renstra / renstra yang disusun	5 Dokumen	47.375.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKAD	Ranwal/ rancangan/ ranhir / renstra / renstra yang disusun	5 Dokumen	47.375.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKAD	LAKIP / LPPK/ LPPD / Lap. Keu / dst. Yang disusun	4 Dokumen	72.199.750	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKAD	LAKIP / LPPK/ LPPD / Lap. Keu / dst. Yang disusun	4 Dokumen	72.199.600	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKAD	Laporan keuangan tahunan OPD		7.190.737.308	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKAD	Laporan keuangan tahunan OPD		7.017.892.308	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKAD	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji/ tunjangan	41 Orang	6.418.792.308	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKAD	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji/ tunjangan	41 Orang	6.418.792.308	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKAD	Jumlah ASN dibayarkan honorarium	24 Orang	649.845.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKAD	Jumlah ASN dibayarkan honorarium	24 Orang	599.100.000	
	Pelaksanaan Pentausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKAD	Jumlah laporan hasil pengujian / verifikasi keuangan OPD yang disusun	12 Bulan	36.000.000	Pelaksanaan Pentausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKAD	Jumlah laporan hasil pengujian / verifikasi keuangan OPD yang disusun	12 Bulan	-	
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BKAD	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	2 Dokumen	86.100.000	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BKAD	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	2 Dokumen	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKAD	Meningkatnya Disiplin Aparatur		104.650.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKAD	Meningkatnya Disiplin Aparatur		53.500.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BKAD	Jumlah pakaian dinas yang di beli	80 Orang	54.650.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BKAD	Jumlah pakaian dinas yang di beli	80 Orang	53.500.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BKAD	Jumlah pegawai yang diberikan pendidikan / pelatihan	5 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BKAD	Jumlah pegawai yang diberikan pendidikan / pelatihan	5 Orang	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKAD	Cakupan layanan adm umum OPD meliputi 7 sub kegiatan (bernilai 100%)		1.388.583.993	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKAD	Cakupan layanan adm umum OPD meliputi 7 sub kegiatan (bernilai 100%)		1.308.160.505	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKAD	Jumlah bulan (waktu) penyediaan penerangan kantor	12 Bulan	61.996.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKAD	Jumlah bulan (waktu) penyediaan penerangan kantor	12 Bulan	26.118.509	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKAD	jumlah alat / perlengkapan kantor yang dibeli / disediakan	12 Bulan	205.994.511	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKAD	jumlah alat / perlengkapan kantor yang dibeli / disediakan	12 Bulan	205.500.820	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKAD	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	63.800.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKAD	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	63.800.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKAD	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	30.792.982	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKAD	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	30.331.976	

NO	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	12
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKAD	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	29 Media	28.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKAD	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	29 Media	27.400.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKAD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi sesuai kebutuhan secara efisien	12 Bulan	900.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKAD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi sesuai kebutuhan secara efisien	12 Bulan	899.809.200	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BKAD	Jumlah kelompok arsip dinamis yang dikelola	12 Bulan	97.200.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BKAD	Jumlah kelompok arsip dinamis yang dikelola	12 Bulan	55.200.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKAD	Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan OPD		969.426.848	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKAD	Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan OPD		956.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKAD	Jumlah kendaraan roda empat / kendaraan roda dua yang di beli	7 Kendaraan Dinas	542.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKAD	Jumlah kendaraan roda empat / kendaraan roda dua yang di beli	7 Kendaraan Dinas	542.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKAD	Jumlah alat / mesin atau (nama alat / mesin) yang di beli	1 Kegiatan	427.426.848	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKAD	Jumlah alat / mesin atau (nama alat / mesin) yang di beli	1 Kegiatan	414.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKAD	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		987.660.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKAD	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		978.020.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKAD	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dikelola	12 Bulan	3.660.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKAD	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dikelola	12 Bulan	2.175.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKAD	Jumlah hitungan beban telepon / air / listrik yang terpakai, atau jumlah hitungan rupiah yang dibayarkan	12 Bulan	264.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKAD	Jumlah hitungan beban telepon / air / listrik yang terpakai, atau jumlah hitungan rupiah yang dibayarkan	12 Bulan	263.995.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKAD	Jumlah Jasa Untuk Pelayanan Kantor	12 Bulan	720.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKAD	Jumlah Jasa Untuk Pelayanan Kantor	12 Bulan	711.850.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKAD	Jumlah total BMD yang dipelihara		342.900.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKAD	Jumlah total BMD yang dipelihara		293.540.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKAD	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara/perbaikan / dibayarkan pajak	- 5 Unit mobil -20 Unit Motor	203.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKAD	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara/perbaikan / dibayarkan pajak	- 5 Unit mobil -20 Unit Motor	165.370.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKAD	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara / perbaikan	14 Unit	90.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKAD	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara / perbaikan	14 Unit	88.170.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKAD	Jumlah gedung kantor / bangunan lainnya yg dipelihara /rehab	1 Unit	49.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKAD	Jumlah gedung kantor / bangunan lainnya yg dipelihara /rehab	1 Unit	40.000.000	

NO	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	12
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BKAD	Persentase pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku		206.874.231.758	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BKAD	Persentase pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku		192.633.032.224	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BKAD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah		2.639.248.945	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BKAD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah		1.299.650.875	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BKAD	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS yang tepat waktu	2 Dokumen	168.992.750	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BKAD	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS yang tepat waktu	2 Dokumen	127.950.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BKAD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	168.992.750	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BKAD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	122.541.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BKAD	Jumlah Raperda/Perda tentang APBD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2.044.483.400	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BKAD	Jumlah Raperda/Perda tentang APBD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	803.328.275	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BKAD	Jumlah Raperda/Perda tentang perubahan APBD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	220.211.025	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BKAD	Jumlah Raperda/Perda tentang perubahan APBD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	212.689.000	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BKAD	Terlaksananya Koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (RKA-SKPD)	1 Kegiatan	36.569.020	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BKAD	Terlaksananya Koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (RKA-SKPD)	1 Kegiatan	33.141.700	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BKAD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah		1.700.935.250	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BKAD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah		427.104.500	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BKAD	Jumlah terbukukannya jenis transaksi pengeluaran, penerimaan, belanja daerah dan Mou antara pihak SKPD dan bank terkait	578 Buku	240.297.500	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BKAD	Jumlah terbukukannya jenis transaksi pengeluaran, penerimaan, belanja daerah dan Mou antara pihak SKPD dan bank terkait	578 Buku	159.300.000	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BKAD	Jumlah terbitnya spd pertriwulan dan spd perubahan pada SKPD	44 SKPD	87.604.250	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BKAD	Jumlah terbitnya spd pertriwulan dan spd perubahan pada SKPD	44 SKPD	60.008.500	

NO	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	12
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BKAD	terlaksananya pembiayaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	44 SKPD	768.350.000	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BKAD	terlaksananya pembiayaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	44 SKPD	35.000.000	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BKAD	Jumlah terbitnya laporan DAK fisik, DAK Non fisik, dana desa dan DID	4 Dokumen	194.000.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BKAD	Jumlah terbitnya laporan DAK fisik, DAK Non fisik, dana desa dan DID	4 Dokumen	84.850.000	
	Koordinasi dan Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga	BKAD	tertibnya laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah pada SKPD	44 SKPD	28.507.500	Koordinasi dan Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga	BKAD	tertibnya laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah pada SKPD	44 SKPD	-	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BKAD	Jumlah terkoordinasinya penagihan piutang dan utang pada SKPD	44 SKPD	42.500.000	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BKAD	Jumlah terkoordinasinya penagihan piutang dan utang pada SKPD	44 SKPD	-	
	Koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	BKAD	terlaksananya pembayaran non tunai terhadap penerimaan dan pembiayaan daerah pada SKPD	44 SKPD	41.776.000	Koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	BKAD	terlaksananya pembayaran non tunai terhadap penerimaan dan pembiayaan daerah pada SKPD	44 SKPD	41.770.000	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi.Terkait	BKAD	terlaksananya rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	44 SKPD	209.600.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi.Terkait	BKAD	terlaksananya rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	44 SKPD	46.176.000	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	BKAD	tersusunnya regulasi tentang administrasi pengelolaan keuangan daerah	4 Dokumen	43.700.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	BKAD	tersusunnya regulasi tentang administrasi pengelolaan keuangan daerah	4 Dokumen	-	
	Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD	terlaksananya pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	44 SKPD	44.600.000	Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD	terlaksananya pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	44 SKPD	-	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BKAD	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah		963.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BKAD	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah		440.409.400	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BKAD	Jumlah dokumen rekonsiliasi pendapatan dan belanja seluruh SKPD	24 Laporan	130.000.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BKAD	Jumlah dokumen rekonsiliasi pendapatan dan belanja seluruh SKPD	24 Laporan	113.100.000	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen laporan Keuangan semester	4 Dokumen	130.000.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen laporan Keuangan semester	4 Dokumen	102.610.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan	BKAD	Jumlah Dokumen Raperda, raperbup dan perda pertanggungjawaban perbub Penjabaran Tentang LKPD	1 Dokumen	150.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan	BKAD	Jumlah Dokumen Raperda, raperbup dan perda pertanggungjawaban perbub Penjabaran Tentang LKPD	1 Dokumen	224.699.400	

NO	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	12
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BKAD	tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah unaudited dan audited tepat waktu	1 Dokumen	230.000.000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BKAD	tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah unaudited dan audited tepat waktu	1 Dokumen	-	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKAD	Tersusunnya sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang	1 Dokumen	123.000.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKAD	Tersusunnya sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku	1 Dokumen	-	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD	Jumlah terlatihnya SDM SKPD dalam menyusun laporan keuangan	1 Kegiatan	200.000.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD	Jumlah terlatihnya SDM SKPD dalam menyusun laporan keuangan	1 Kegiatan	-	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		201.571.047.563	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		190.465.867.449	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BKAD	Jumlah laporan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	114 Desa	192.316.809.615	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BKAD	Jumlah laporan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	114 Desa	181.578.073.900	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BKAD	Terlaksananya pengelolaan anggaran belanja tidak terduga	1 Tahun	5.411.624.400	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BKAD	Terlaksananya pengelolaan anggaran belanja tidak terduga	1 Tahun	5.400.000.000	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BKAD	Terlaksananya pengelolaan dana bagi hasil	114 Desa	3.842.613.548	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BKAD	Terlaksananya pengelolaan dana bagi hasil	114 Desa	3.487.793.549	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BKAD	Terciptanya tata kelola Barang Milik Daerah yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku		1.531.110.000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BKAD	Terciptanya tata kelola Barang Milik Daerah yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku		1.095.507.300	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD	Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah		1.531.110.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD	Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah		1.095.507.300	
	Penyusunan Standar Harga	BKAD	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga Barang	1 Dokumen	96.500.000	Penyusunan Standar Harga	BKAD	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga Barang	1 Dokumen	85.155.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Rencana kebutuhan barang milik daerah	2 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Rencana kebutuhan barang milik daerah	2 Dokumen	-	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah data barang milik daerah yang berbasis sistem informasi	45 OPD	169.750.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah data barang milik daerah yang berbasis sistem informasi	45 OPD	169.750.000	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah dokumen/laporan inventarisasi barang milik daerah	1 Dokumen	70.000.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah dokumen/laporan inventarisasi barang milik daerah	1 Dokumen	-	

NO	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	12
	Pengamanan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah dokumen kepemilikan sebagai legalitas hukum atas barang milik daerah	10 dokumen	428.700.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah dokumen kepemilikan sebagai legalitas hukum atas barang milik daerah	10 dokumen	428.700.000	
	Penilaian Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah dokumen penilaian barang milik daerah	1 Dokumen	77.000.000	Penilaian Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah dokumen penilaian barang milik daerah	1 Dokumen	27.166.300	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah dokumen penggunaan, pemanfaatan, penilaian dan penghapusan barang milik daerah	6 Dokumen	459.160.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah dokumen penggunaan, pemanfaatan, penilaian dan penghapusan barang milik daerah	6 Dokumen	297.496.000	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah dokumen rekonsiliasi barang milik daerah seluruh SKPD	45 OPD	110.000.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah dokumen rekonsiliasi barang milik daerah seluruh SKPD	45 OPD	87.240.000	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah (semester dan tahunan)	2 Dokumen	70.000.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah (semester dan tahunan)	2 Dokumen	-	
					219.508.874.657					204.455.226.937	

1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2021 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas, adapun usulan program seseuai dengan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 Yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN (2015-2019) Bab 6 yaitu Agenda Pembangunan Nasional. Pembangunan nasional yang digariskan dalam RPJMN ini dilaksanakan melalui upaya seluruh komponen bangsa, yang akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan

Dalam pelaksanaan RPJMN yang dikenal sebagai Program Nawa Cita (Agenda Prioritas), Program Nawa Cita merupakan Program Nasional yang membuat Visi dan Misi Bangsa yaitu ***“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”***.

Untuk melaksanakan visi tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangan dengan tetap menjamin kestabilan ekonomi yang terintegrasi dengan kebijakan daerah yang dapat menunjang tugas desentralisasi sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan mensinergikan penjabaran kebijakan program daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan program nawa cita.

Pada Bab 6 salah satu agenda pembangunan nasional yaitu membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, disusun 5 sub agenda prioritas sebagai berikut :

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
2. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan;
3. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan;
4. Menyempurnakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); dan
5. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.

Dari kelima sub agenda prioritas pembangunan nasional, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada sub agenda prioritas RPJMN yaitu ***“Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan”***.

Bagian dari sub agenda prioritas pembangunan nasional tersebut adalah visi BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat yaitu ***“Keuangan Yang Efektif, Efisien, Ekonomis dan Akuntabel”***

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dapat memberikan pelayanan yang terbaik terutama dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam lingkup keuangan demi kemajuan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan sedangkan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel. Adapun tujuan, sasaran, indikator dan target OPD selama 5 Tahun ditunjukkan pada tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2022
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kerja BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SKPD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (dalam hal ini BKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun programnya bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, utamanya di bidang keuangan dan aset daerah, meliputi :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program kegiatan BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun Anggaran 2021, dapat diuraikan pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

TABEL 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode Rek	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022			Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi/Unit Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		BKAD		10.726.687.413	APBD		11.250.619.490
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Renstra / Renja / Dpa / Evaluasi Renstra, Renja / Lakip yang disusun	BKAD		119.574.600	BKAD		119.574.750
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ranwal/ rancangan/ ranhir / renstra / renstra yang disusun	BKAD	5 Dokumen	47.375.000	APBD	5 Dokumen	47.375.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAKIP / LPPK/ LPPD / Lap. Keu / dst.. Yang disusun	BKAD	4 Dokumen	72.199.600	APBD	4 Dokumen	72.199.750
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan keuangan tahunan OPD	BKAD		7.017.892.308	APBD		7.544.169.173
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji/ tunjangan	BKAD	41 Orang	6.418.792.308	APBD	41 Orang	6.739.731.923
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN dibayarkan honorarium	BKAD	24 Orang	599.100.000	APBD	24 Orang	682.337.250
	Pelaksanaan Pentausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan hasil pengujian / verifikasi keuangan OPD yang disusun	BKAD	12 Bulan	-	APBD	12 Bulan	36.000.000
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang tersiapkan	BKAD	2 Dokumen	-	APBD	2 Dokumen	86.100.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin Aparatur	BKAD		53.500.000	APBD		117.870.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang di beli	BKAD	80 Orang	53.500.000	APBD	80 Orang	67.870.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang diberikan pendidikan / pelatihan	BKAD	5 Orang	-	APBD	5 Orang	50.000.000

Kode Rek	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022			Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi/Unit Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan adm umum OPD meliputi 7 sub kegiatan (bernilai 100%)	BKAD		1.308.160.505	APBD		1.507.838.719
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan (waktu) penyediaan penerangan kantor	BKAD	12 Bulan	26.118.509	APBD	12 Bulan	64.996.500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat / perlengkapan kantor yang dibeli / disediakan	BKAD	12 Bulan	205.500.820	APBD	12 Bulan	216.249.237
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	BKAD	12 Bulan	63.800.000	APBD	12 Bulan	63.800.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	BKAD	12 Bulan	30.331.976	APBD	12 Bulan	36.792.982
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	BKAD	29 Media	27.400.000	APBD	29 Media	28.800.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi sesuai kebutuhan secara efisien	BKAD	12 Bulan	899.809.200	APBD	12 Bulan	1.000.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah kelompok arsip dinamis yang dikelola	BKAD	12 Bulan	55.200.000	APBD	12 Bulan	97.200.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan OPD	BKAD		956.000.000	APBD		537.426.848
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda empat / kendaraan roda dua yang di beli	BKAD	7 Kendaraan Dinas	542.000.000	APBD	7 Kendaraan Dinas	410.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat / mesin atau (nama alat / mesin) yang di beli	BKAD	1 Kegiatan	414.000.000	APBD	1 Kegiatan	127.426.848
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	BKAD		978.020.000	APBD		1.049.660.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dikelola	BKAD	12 Bulan	2.175.000	APBD	12 Bulan	3.660.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah hitungan beban telepon / air / listrik yang terpakai, atau jumlah hitungan rupiah yang	BKAD	12 Bulan	263.995.000	APBD	12 Bulan	290.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Untuk Pelayanan Kantor	BKAD	12 Bulan	711.850.000	APBD	12 Bulan	756.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah total BMD yang dipelihara	BKAD		293.540.000	APBD		374.080.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara/perbaikan / dibayarkan pajak	BKAD	- 5 Unit mobil -20 Unit Motor	165.370.000	APBD	- 12 Unit mobil -20 Unit Motor	225.080.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara / perbaikan	BKAD	14 Unit	88.170.000	APBD	14 Unit	100.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor / bangunan lainnya yg dipelihara /rehab	BKAD	1 Unit	40.000.000	APBD	1 Unit	49.000.000

Kode Rek	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022			Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi/Unit Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku	BKAD		192.633.032.224	APBD		217.713.483.716
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	BKAD		1.299.650.875	APBD		3.035.136.288
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS yang tepat waktu	BKAD	2 Dokumen	127.950.500	APBD	2 Dokumen	194.341.663
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	BKAD	2 Dokumen	122.541.400	APBD	2 Dokumen	194.341.663
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperda/Perda tentang APBD yang disusun tepat waktu	BKAD	2 Dokumen	803.328.275	APBD	2 Dokumen	2.351.155.910
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Raperda/Perda tentang perubahan APBD yang disusun tepat waktu	BKAD	2 Dokumen	212.689.000	APBD	2 Dokumen	253.242.679
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (RKA-SKPD)	BKAD	1 Kegiatan	33.141.700	APBD	1 Kegiatan	42.054.373
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	BKAD		427.104.500	APBD		1.952.747.487
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah terbukukannya jenis transaksi pengeluaran, penerimaan, belanja daerah dan Mou antara pihak	BKAD	578 Buku	159.300.000	APBD	578 Buku	276.342.125
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah terbitnya spd pertriwulan dan spd perubahan pada SKPD	BKAD	44 SKPD	60.008.500	APBD	44 SKPD	100.744.888
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	terlaksananya pembiayaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	BKAD	44 SKPD	35.000.000	APBD	44 SKPD	883.602.500
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah terbitnya laporan DAK fisik, DAK Non fisik, dana desa dan DID	BKAD	4 Dokumen	84.850.000	APBD	4 Dokumen	223.100.000
	Koordinasi dan Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga	tertibnya laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah pada SKPD	BKAD	44 SKPD	-	APBD	44 SKPD	28.507.500
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah terkoordinasinya penagihan piutang dan utang pada SKPD	BKAD	44 SKPD	-	APBD	44 SKPD	44.625.000

Kode Rek	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022			Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi/Unit Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	terlaksananya pembayaran non tunai terhadap penerimaan dan pembiayaan daerah pada SKPD	BKAD	44 SKPD	41.770.000	APBD	44 SKPD	62.070.474
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	terlaksananya rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pematangan atas SP2D dengan instansi terkait	BKAD	44 SKPD	46.176.000	APBD	44 SKPD	241.040.000
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	tersusunnya regulasi tentang administrasi pengelolaan keuangan daerah	BKAD	4 Dokumen	-	APBD	4 Dokumen	45.885.000
	Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	terlaksananya pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD	44 SKPD	-	APBD	44 SKPD	46.830.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	BKAD		440.409.400	APBD		1.076.000.000
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	Jumlah dokumen rekonsiliasi pendapatan dan belanja seluruh SKPD	BKAD	24 Laporan	113.100.000	APBD	24 Laporan	173.000.000
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen laporan Keuangan semester	BKAD	4 Dokumen	102.610.000	APBD	4 Dokumen	175.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Raperda, raperbup dan perda pertanggungjawaban perbub Penjabaran Tentang LKPD	BKAD	1 Dokumen	-	APBD	1 Dokumen	150.000.000
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah unaudited dan audited tepat waktu	BKAD	1 Dokumen	224.699.400	APBD	1 Dokumen	223.000.000
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku	BKAD	1 Dokumen	-	APBD	1 Dokumen	130.000.000
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah terlatihnya SDM SKPD dalam menyusun laporan keuangan	BKAD	1 Kegiatan	-	APBD	1 Kegiatan	225.000.000
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD		190.465.867.449	APBD		211.649.599.941
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	BKAD	114 Desa	181.578.073.900	APBD	114 Desa	201.932.650.096
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya pengelolaan anggaran belanja tidak terduga	BKAD	1 Tahun	5.400.000.000	APBD	1 Tahun	5.682.205.620
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan dana bagi hasil	BKAD	114 Desa	3.487.793.549	APBD	114 Desa	4.034.744.225

Kode Rek	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022			Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi/Unit Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terciptanya tata kelola Barang Milik Daerah yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan	BKAD		1.095.507.300	APBD		1.565.100.000
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah	BKAD		1.095.507.300	APBD		1.565.100.000
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga Barang	BKAD	1 Dokumen	85.155.000	APBD	1 Dokumen	101.400.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana kebutuhan barang milik daerah	BKAD	2 Dokumen	-	APBD	2 Dokumen	52.500.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah data barang milik daerah yang berbasis sistem informasi	BKAD	45 OPD	169.750.000	APBD	45 OPD	173.200.000
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen/laporan inventarisasi barang milik daerah	BKAD	1 Dokumen	-	APBD	1 Dokumen	73.500.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen kepemilikan sebagai legalitas hukum atas barang milik daerah	BKAD	10 dokumen	428.700.000	APBD	10 dokumen	433.000.000
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penilaian barang milik daerah	BKAD	1 Dokumen	27.166.300	APBD	1 Dokumen	80.900.000
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penggunaan, pemanfaatan, penilaian dan penghapusan barang milik daerah	BKAD	6 Dokumen	297.496.000	APBD	6 Dokumen	463.800.000
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen rekonsiliasi barang milik daerah seluruh SKPD	BKAD	45 OPD	87.240.000	APBD	45 OPD	113.300.000
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah (semester dan tahunan)	BKAD	2 Dokumen	-	APBD	2 Dokumen	73.500.000
					204.455.226.937			230.529.203.206

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Rancangan akhir RenjaBadan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 ini merupakan rencana kerjatahunan yang disusun berdasarkan RENSTRA Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2022. Rancangan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 juga merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020, sehingga Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2022 dengan efektif dan efisien.
2. Rancangan akhir Renja BKAD Tahun 2022 dijadikan sebagai bagian Rumusan Penetapan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Rancangan akhir Renja sebagai penajaman Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah berdasarkan Program, kegiatan dan Pagu Indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
4. Tata cara penyusunan Rancangan akhir Renja Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.
5. Rancangan Renja Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan Rancangan Akhir Renja yang telah diuraikan diatas maka ada catatan penting yang perlu diperhatikan.

- Bahwa penyusunan Rancangan Awal dan Rancangan Renja Tahun 2022 telah di terlaksana dengan baik.
- Optimalisasi kinerja semua bidang (pegawai) merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan dalam tupoksi di BKAD.
- Rencana tindak lanjut dari program BKAD tetap mengedepankan bekerja dengan baik dengan menerapkan prinsip transparan dan akuntabel.